

Komisi A Minta Raperda APBD

MEMPAWAH, TRIBUN - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto, mendesak pemerintah Kabupaten Pontianak segera menyerahkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010.

Dia menjelaskan, dalam UU nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara, pemerintah harus menyerahkan Raperda tersebut ke DPRD maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Dalam Pasal 31 ayat 1, menyebutkan gubernur, bupati dan wali kota menyampaikan Raperda berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK ke Dewan, maksimal enam bulan. Kalau dihitung enam bulan dari Desember berarti Mei, paling telat Juni. Namun nyatanya sampai sekarang belum ada," ucap Susanto

” Kalau dihitung enam bulan dari Desember berarti Mei, paling telat Juni. Namun nyatanya sampai sekarang belum ada. ”

SUSANTO

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak

kepada *Tribun*, Kamis (7/7).

Dia berkeyakinan, laporan hasil audit BPK laporan keuangan Pemkab ke DPRD dalam aturannya laporan hasil pemeriksaan (LHP) itu dari BPK. Sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 2004, menyatakan LHP dari BPK ke DPRD, selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah, yakni pada bulan Mei setiap tahunnya.

"BPK mengaudit bulan April dan Bulan Mei, akhir Mei sudah ada hasilnya di sudah me-

nyerahkan ke DPRD, dan Kabupaten Pontianak mendapat predikat wajar dengan pengecualian. Akan tetapi Raperdanya sampai sekarang belum diserahkan oleh pemerintah daerah ke Dewan," tutur Susanto.

Jika penyerahan Raperda telat, maka berimbas kepada agenda lainnya. Sedangkan pada tahun ini agenda DPRD Kabupaten Pontianak sangat padat. Tidak tepatnya waktu penyerahan Raperda tersebut, dinilai Susanto menunjukkan eksekutif tidak patuh terhadap aturan.

"Dengan padatnya jadwal

kegiatan Dewan, berimplikasi terhadap pengawasan. Fungsi Dewan selaku pengawas tidak maksimal karena menumpuknya agenda," papar Susanto.

Dihubungi terpisah, Bupati Ria Norsan, menjelaskan tidak lagi harus dibuat Raperda, karena hasil dari BPK eksekutif dan legislatif sudah menerima masing-masing satu laporan. "Sewaktu penerimaan hasil laporan BPK, saya dan Ketua DPRD, Rahmad Satria, sama-sama menerimanya. Bupati satu dan Ketua DPRD satu," jelas Ria Norsan.

Setelah menerima laporan itu, pemerintah daerah langsung melakukan perbaikan menindaklanjuti hasil temuan. Dari hasil tindak lanjut di dalam, tidak terdapat temuan atau kerugian yang diganti oleh pemerintah. (din)